IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DALAM MENYEDIAKAN BASIS DATA YANG AKURAT DAN TRANSPARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

(Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MUHAMMAD FIRDAUS FEBRIANSYAH
NIM. 07011381823112

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Firdaus Febriansyah
NIM	: 07011381823112
Tempat/Tanggal Lahir	: Karya Maju/ 21 Februari 2000
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari dosen pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Firdaus Febriansyah
NIM. 07011381823112

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DALAM MENYEDIAKAN BASIS DATA YANG AKURAT DAN TRANSPARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MUHAMMAD FIRDAUS FEBRIASNYAH
07011381823112

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 28 April 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS.,MM.
NIP. 195811191985031003

Pembimbing II

Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DALAM MENYEDIAKAN BASIS DATA YANG AKURAT DAN TRANSPARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN"

Skripsi
Oleh :

MUHAMMAD FIRDAUS FEBRIANSYAH
07011381823112

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 16 Juni 2022

Pembimbing : Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.
   NIP. 195811191985031003

2. Drs. Gatot Budiarto, MS.
   NIP. 195806091984031002

Penguji : Tanda Tangan

1. Drs. Mardianto, M.Si.
   NIP. 196211251989121001

2. Anang Dwi Santoso, S.A.P., MPA.
   NIP. 199310072019031012

Mengetahui,

Dekan FISIP

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan "
(Gus Dur)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu Penulis **(Asan, S.Pd., M.Si. dan Masayu Mariamah, S.Pd.)** sebagai motivasi dalam hidup yang selalu mendukung dari segi moral dan material;
2. Kakak dan Adik Penulis **(Muhammad Iqbal Oktavin, S.T., Siti Syafiyya Salsabila dan Momoy)** yang selalu memberi semangat, dukungan dan senyuman;
3. Rekan–rekan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018;
4. Almamater Kebanggaan;
5. Apresiasi diri Penulis sendiri.

ABSTRACT

This research was born because it is motivated by the difficulty of finding statistical data that can be used by the public and the government to meet information needs. The purpose of this study is to find out how the implementation of the one-data policy in South Sumatra Province and to find out the factors that inhibit and support the success of the policy based on the theory of the policy implementation model created by George C. Edward III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews, documentation and observations at locations related to the implementation of the one data policy of South Sumatra Province. The South Sumatra Province one data policy is carried out by data supervisors, data guardians and data producers in accordance with the stages contained in the South Sumatra Governor Regulation Number 4 of 2021 concerning One South Sumatra Province Data. Supporting factors in this policy are clarity and consistency of communication, available information and authority resources and dispositions in the form of cognition, response directions and incentives, while the inhibiting factors during policy implementation are communication transmission that has not run optimally, human resources that have not competent, supporting facilities that have not had technology updates and there are no standard operating procedures to facilitate work and ineffective work coordination. Therefore, it is better to make improvements to the transmission of communication, continue to increase the capacity of human resources, update policy support facilities, accelerate the creation of standard operating procedures and strengthen work coordination by implementing a reward and punishment system in order to overcome obstacles to the implementation of the One Data South Sumatra Province policy.

Keywords: Implementation, One Data Policy, South Sumatra Province

ADVISOR I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS.,MM.
NIP. 195811191985031003

ADVISOR II

Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002

Palembang, Juni 2022
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty Social and Political Science
University Of Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini lahir karena dilatarbelakangi oleh sulitnya pencarian data-data statistik yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan satu data di Provinsi Sumatera Selatan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberhasilan kebijakan berdasarkan teori model implementasi kebijakan yang diciptakan oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi di lokasi yang berkaiatan dengan implementasi kebijakan satu data Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan satu data Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tahap-tahap yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah kejelasan dan konsistensi komunikasi, sumber daya informasi dan wewenang yang telah tersedia serta disposisi berupa kognisi,arahan tanggapan dan adanya insentif, sedangkan faktor penghambat saat implementasi kebijakan yaitu pada transmisi komunikasi yang belum berjalan secara optimal, sumber daya manusia yang belum berkompeten, fasilitas penunjang yang belum ada pembaruan teknologi dan belum adanya standar operasional prosedur untuk mempermudah pekerjaan serta koordinasi kerja yang belum efektif. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan perbaikan pada transmisi komunikasi, terus dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan fasilitas penunjang kebijakan, percepatan pembuatan standar operasional prosedur serta memperkuat koordinasi kerja dengan menerapkan sistem penghargaan dan hukuman agar dapat mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Satu Data, Provinsi Sumatera Selatan

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS.,MM.	**Drs. Gatot Budiarto, MS.**
NIP. 195811191985031003	**NIP. 195806091984031002**

Palembang, Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "**Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)"** tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terkhusus kepada Ayahanda Asan, S.Pd., M.Si. dan Ibunda Masayu Mariamah, S.Pd. atas segala do'a, nasehat, dukungan, serta pengorbanan–nya dari segi moril dan materil kepada Penulis serta kakak Penulis Muhammad Iqbal Oktavin, S.T. dan adik Penulis Siti Syafiyya Salsabila yang selalu mendokan, menghibur, menyemangati dan mendukung Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM. selaku dosen pembimbing Skripsi I yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan kritik, saran dan bimbingan yang sangat berguna untuk penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS. selaku dosen pembimbing Skripsi II yang juga telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan kritik, saran dan bimbingan yang sangat berguna untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat bagi saya dalam menjalankan proses pembelajaran akademik ini selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Seluruh pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Palembang.
8. Bapak H. Achmad Rizwan, S.STP., MM. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh pegawai.
9. Bapak Dr. Ir. Zulkipli M.Si selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh pegawai.
10. Bapak Dr. Aufa Syahrizal, S.P., M.SC. Selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh pegawai.
11. Ady Cita Prasetya, S.AP., dan Mohd. Faisal Djulana, S.AP. Selaku teman penulis yang berkontribusi langsung dalam penyusunan skripsi.

Dengan selesai nya penulis dalam pengerjaan skripsi ini maka diharapkan berguna serta bermanfaat bagi kegiatan akademik, bagi masyarakat umum dalam mengetahui permasalahan yang terjadi lalu ditemukan penyelesaiannya dengan konsep implementasi kebijakan publik.

Palembang, Juni 2022

Penulis

Muhammad Firdaus Febriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv
ABSTRACT.....v
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR GAMBAR.....xi
DAFTAR LAMPIRAN.....xii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....13
C. Tujuan Penelitian.....13
D. Manfaat Penelitian.....13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....15
A. Konsep dan Teori.....15
1. Definisi Kebijakan Publik.....15
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....16
B. Basis Data.....23
C. Data yang Akurat dan Transparan.....23
D. Teori yang Digunakan.....25
E. Kerangka Teori.....26
F. Penelitian Terdahulu.....33
G. Kerangka Berpikir.....35
BAB III METODE PENELITIAN.....37
A. Desain Penelitian.....37
B. Jenis Penelitian.....37
C. Definisi Konsep.....39
D. Fokus Penelitian.....40
E. Jenis dan Sumber Data 47
F. Unit Analisis Data.....48
G. Informan Penelitian.....48
H. Teknik Pengumpulan Data.....49
I. Teknik Analisis Data.....51
J. Teknik Keabsahan Data.....52
K. Sistematika Penulisan.....53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....55
A. Gambaran Umum Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....55
1. Sejarah Berdirinya Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....55
2. Landasan Hukum Pembentukan Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....57
3. Visi dan Misi Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....57
4. Tugas dan FungsiDiskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....58
5. Struktur Organisasi Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....59

B. Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan.....60
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan.....60
a. Komunikasi.....67
1) Transmisi 67
2) Kejelasan 69
3) Konsistensi.....70
b. Sumber Daya.....71
1) Staf.....71
2) Informasi.....76
3) Wewenang.....78
4) Fasilitas.....80
c. Disposisi.....85
1) Kognisi.....85
2) Arahan.....87
3) Tanggapan.....89
4) Pengangkatan Birokrasi.....91
5) Insentif.....93
d. Struktur Birokrasi 93
1) Standar Operasional Prosedur 93
2) Fragmentasi 95
2. Apa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan.....101
BAB V PENUTUP 105
A. Kesimpulan.....105
B. Saran.....110
DAFTAR PUSTAKA.....113
LAMPIRAN.....115

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Produsen Data Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.....5
2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap TIK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....9
3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....10
4. Penelitian Terdahulu.....33
5. Fokus Penelitian.....41
6. Instansi Penyelenggara Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.....61
7. SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan 2022.....72
8. Sosialisasi kebijakan satu data oleh Bappenas RI.....77
9. Matriks Hasil dan Pembahasan Penelitian.....99

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Portal Sistem Informasi Satu Data Indonesia……2
2. Portal Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan.....8
3. Implementasi Kebijakan Publik oleh Van Meter dan Van Horn.....18
4. Model Implementasi Kebijakan Edwards III.....19
5. Kerangka Pemikiran Penelitian.....36
6. Teknik Analisis data Miles, Huberman dan Saldana.....51
7. Teknik Triangulasi Metode.....53
8. Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.....56
9. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.....56
10. Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.....59
11. Tahap Penyelenggraan Kebijakan Satu Data.....,.....64
12. Portal Sistem Informasi Satu Data SIMATA.....66
13. Kegiatan Penyaluran Informasi ke Tim Pengelola Satu Data Sumatera Selatan.....68
14. Media Transmisi Kuminikasi Internal Tim Pengelola Satu Data.....68
15. SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.....72
16. SDM di Bidang Statistik tahun 2022.....74
17. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Statistik dan tim satu data.....75
18. Sumber Informasi Tertulis Kebijakan Satu Data.....77
19. Wewenang instansi terkait dalam Pergub Sumsel No 4 Tahun 2021.....79
20. Inventaris Barang di Bidang Statistik tahun 2020.....81
21. Perangkat Komputer Penunjang Satu Data.....82
22. Inventaris Barang di Ruangan Data Center Provinsi Sumatera Selatan 2020.....82
23. Sistem keamanan ruangan data center.....83
24. Banner computer security incident response team data center Provinsi Sumatera Selatan.....83
25. Tampak dalam ruangan data center Provinsi Sumatera Selatan.....84
26. Arahan dari Kepala Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....89
27. Launching portal SIMATA oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.....90
28. SK Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan.....92
29. *MOU* Pemerintah daerah dan BPS Provinsi Sumatera Selatan.....97
30. Koordinasi kerja satu data Sumatera Selatan via daring.....98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....116
2. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing I 117
3. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing II.....118
4. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Pembimbing I 119
5. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Pembimbing II.....120
6. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....121
7. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....122
8. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Pembimbing I.....123
9. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Pembimbing II.....124
10. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Penguji I.....125
11. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Penguji II.....126
12. Surat Izin Penelitian Kepada Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....127
13. Surat Balasan Izin Penelitian Oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan.....128
14. Surat Izin Penelitian Kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan 129
15. Pedoman Pengumpulan Data.....130
16. Dokumentasi Penelitian.....133
17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Sumatera Selatan.....136
18. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.....157
19. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan.....164
20. Inventaris Barang Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.....169
21. Inventaris Barang Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan.....170
22. Inventaris Barang Data Center Provinsi Sumatera Selatan.....171
23. Pernyataan Orisinalitas.....172

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
GCIO	*: Government Chief Information Officer*
MOU	: *Memorandum of Understanding*
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POKJA	: Kelompok Kerja
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	*: Sustainable Development Goals*
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDI	: Satu Data Indonesia
SIMATA	: Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sumsel	: Sumatera Selatan
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya akan informasi dan data yang berharga, dari pusat hingga ke daerah yang memberikan informasi perekonomian, kesehatan, pangan, pendidikan, transportasi, dan aspek lainnya. Informasi dan data yang berharga tersebut berguna sebagai landasan dalam melakukan perencanaan pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pembuatan kebijakan yang berlandaskan data di lapangan akan memberikan akibat yang positif bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut harus mampu menciptakan suatu ekosistem basis data yang mampu menyediakan data yang akurat dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Data terbuka merupakan data yang dapat di akses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikan ulang kepada siapa pun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama. Data terbuka membuat penggunaan mencari data lebih mudah, dengan menyediakan data yang mudah di akses masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan, data tersebut juga dapat disebarluaskan dan digunakan berulang-ulang, dapat di akses oleh seluruh masyarakat, dan menciptakan sistem yang transparan, selain itu data terbuka juga memungkinkan partisipasi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bekerja sama dalam mendorong inovasi.

Data yang terbuka memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dalam setiap jajaran pemerintahan, kerja sama antar lembaga yang memungkinkan pembangunan yang lebih lancar, dan data yang tersedia secara bebas dapat meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi serta kualitas pelayanan publik akan lebih meningkat karena kinerja lembaga yang lebih efektif.

Pada kenyataannya perwujudan data yang terbuka di Indonesia belum berjalan secara optimal dan belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat karena banyaknya data yang masih berbentuk *hard copy*, data yang masih tertutup dan kurang tersebar, serta kurangnya sosialisasi kepada publik membuat data sulit ditemukan sehingga transparansi pemerintah kurang dijalankan, di sinilah data yang terbuka menjadi solusi. Oleh karena itu maka dibuatlah kebijakan tentang Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang mutakhir, akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah di akses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk digunakan oleh seluruh masyarakat melalui pemenuhan Standar Data, Interoperabilitas Data, Metadata dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Indonesia dapat menjadi pedoman pelaksanaan bagi instansi untuk mendorong keterbukaan data, serta mendukung data statistik nasional sebagai dasar dalam membuat kebijakan.

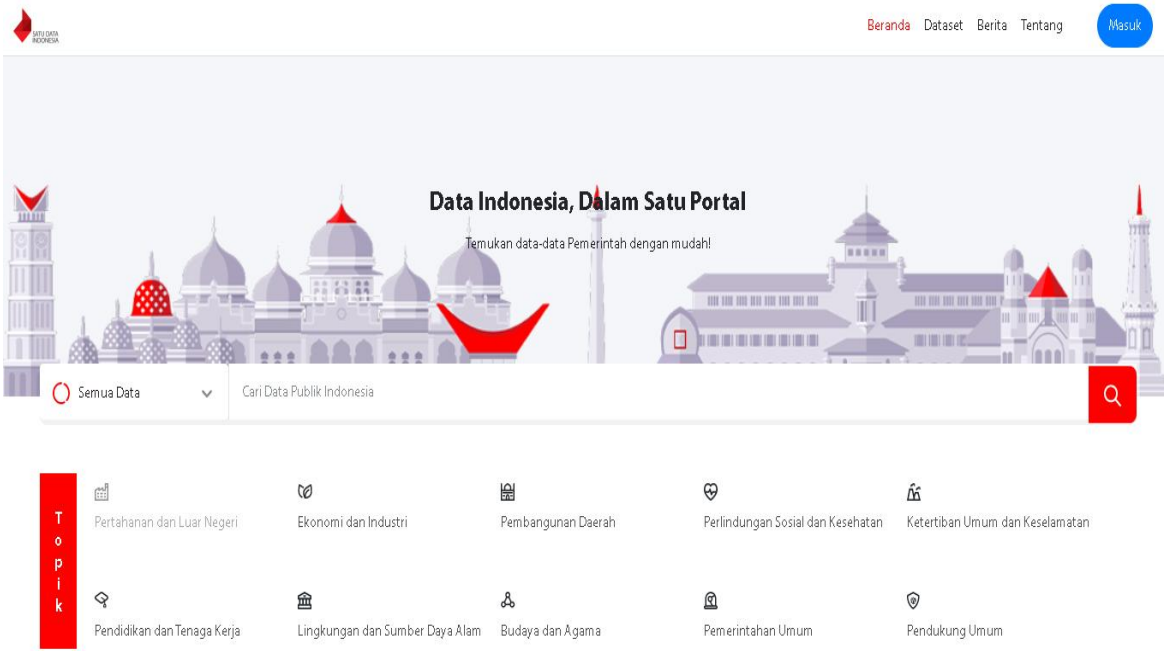

Gambar 1. Portal Sistem Informasi Satu Data Indonesia
Sumber: Portal Satu Data Indonesia

Pada gambar 1 menujukan tampilan beranda portal Satu Data Indonesia sebagai wadah pengumpulan data-data nasional yang telah ditetapkan. Data Satu Data Indonesia dibagikan dalam format yang dapat digunakan kembali serta data yang bebas biaya, untuk itu Satu Data Indonesia memastikan bahwa data yang dihasilkan sudah memenuhi empat prinsip Satu Data Indonesia. Portal SDI dibuat dengan tujuan agar data-data yang telah dikumpulkan dan disebarluaskan dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia serta untuk mengetahui data-data dan informasi yang akurat

Pada masa pandemi covid-19, pemerintah menetapkan tiga program strategis yang akan menjadi data prioritas kebijakan satu data, diantaranya Data bantuan sosial, bantuan pemerintah dan subsidi, Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Data 17 Indikator *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Program-program tersebut menjadi isu nasional karena pada kenyataannya ketersediaan dan pengelolaan data di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup berat, pemerintah sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan masih sering kesulitan mencari data antar lembaga, yang menyebabkan sering terhambatnya dalam melaksanakan program-program yang akan dijalankan

Pada pelaksanaan program data bantuan sosial atau bantuan pemerintah dan subsidi, pemerintah kerap kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat penerima bantuan, bahkan dalam beberapa kasus dan temuan masyarakat di lapangan, pemberian bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran karena banyaknya data penduduk yang tumpang tindih. Oleh karena itu bersama dengan kelompok kerja (Pokja) Forum SDI Bidang Keuangan Negara melakukan dukungan percepatan menyiapkan keputusan menteri mengenai gugus tugas percepatan guna memformulasikan hal teknis penyelenggaraan SDI.

Selanjutnya Program Data UMKM, karena adanya pandemi covid-19 pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menurunkan laju penularan virus, salah satu dampak dari pelaksanaan PPKM tersebut adalah volume

transaksi perekonomian nasional menurun drastis, hal tersebut sangat dirasakan oleh pemilik UMKM baik itu UMKM di perkotaan maupun UMKM pada destinasi pariwisata, kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata juga mengalami penurunan yang sangat drastis dan menyebabkan banyak UMKM yang terpaksa untuk menghentikan aktivitasnya, bahkan tidak sedikit UMKM terancam gulung tikar akibat dari pelaksanaan PPKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan suntikan dana segar agar UMKM dapat terus menjalankan usahanya, tetapi dalam memberikan bantuan dana, pemerintah kesulitan dalam menetapkan UMKM yang berhak menerima bantuan karena minimnya ketersediaan data mengenai jumlah dan kondisi UMKM terkini. Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang merupakan *leading sector* basis data UMKM akan membentuk gugus tugas percepatan untuk menyiapkan peta jalan, rencana tindak, dan langkah awal penyiapan basis data tunggal UMKM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan koridor Kebijakan Satu Data Indonesia.

Kemudian program data 17 indikator *SDGs.* Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan *(SDGs)* berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan *SDGs* melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis salah satunya adalah melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator *SDGs* pada setiap target dan tujuan. Ketersediaan data dalam melakukan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang harus dimiliki agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat optimal. Instansi pusat maupun daerah harus berkolaborasi dalam menyediakan data baik itu untuk digunakan dalam membuat kebijakan maupun untuk dibagikan kepada masyarakat umum, namun kenyataannya minimnya ketersediaan data yang dibagikan ke masyarakat juga menjadi peristiwa nyata

yang telah terjadi hingga saat ini, peristiwa tersebut menandai belum diterapkannya prinsip transparansi di instansi pemerintahan, membuat masyarakat kurang percaya terhadap pelayanan yang diberikan.

Permasalahan ketersediaan dan pengelolaan data juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada organisasi perangkat daerah yang langsung berada di bawah naungan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terutama mengenai data-data statistik yang dihasilkan agar dapat membantu kepala daerah dalam membuat keputusan penting di masa yang akan datang. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 892/KPTS/DISKOMINFO/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan merupakan wujud nyata dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi ketersediaan serta meningkatkan kualitas pengelolaan data di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Produsen Data di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Instansi	Peran	Status
	OPD		
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan	Produsen data	Aktif
2.	Dinas Kesehatan	Produsen data	Aktif
3.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Produsen data	Aktif
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Produsen data	Aktif
5.	Dinas Perhubungan	Produsen data	Aktif
6.	Dinas Perindustrian	Produsen data	Aktif
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Produsen data	Aktif
8.	Dinas Perkebunan	Produsen data	Aktif
9.	Dinas Kehutanan	Produsen data	Aktif

10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata dan Produsen data	Aktif
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Produsen data	Aktif
12.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Produsen data	Aktif
13.	Badan Kepegawaian Daerah	Produsen data	Aktif
14.	Badan Pendapatan Daerah	Produsen data	Aktif
15.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Produsen data	Aktif
16.	DPRD Tingkat I	Produsen data	Aktif
VERTIKAL/BUMN/BUMD/INSTANSI			
1.	Badan Pertanahan Nasional	Produsen data	Aktif
2.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Produsen data	Aktif
3.	Kementrian Agama	Produsen data	Aktif
4.	Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	Produsen data	Aktif
5.	Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional	Produsen data	Aktif
6.	Polisi Daerah	Produsen data	Aktif
7.	SIMPONI Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan RI	Produsen data	Aktif
8.	Mahkamah Agung	Produsen data	Aktif
9.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Produsen data	Aktif
10.	Kementrian Sosial	Produsen data	Aktif
11.	Kementrian Kelautan dan Perikanan	Produsen data	Aktif
12.	Pembangkit Listrik Negara	Produsen data	Aktif

13.	Perusahaan Daerah Air Minum	Produsen data	Aktif
14.	PT POS Indonesia	Produsen data	Aktif
15.	Bank Indonesia	Produsen data	Aktif
16.	Kementrian Koperasi dan UMKM	Produsen data	Aktif
TOTAL		**32**	

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari BPS Sumsel tahun 2021

Pada tabel 1 menunjukkan 16 instansi OPD dan 16 instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang menjadi produsen data di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 pasal 19 ayat 1 produsen data adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi, tetapi dalam hal ini instansi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi vertikal juga dapat menjadi produsen data karena produsen data yang aktif saat ini merupakan instansi terkait dengan data prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan daftar data prioritas dari pemerintah pusat merujuk pada kebutuhan data pada tahun tertentu dengan melihat kondisi nyata dalam masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan mendesak, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mendukung prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Kebijakan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan juga nantinya akan menghasilkan data-data statistik maupun data-data geospasial yang disebarluaksan melalui Portal Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan atau SIMATA yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan namun masih tetap di dalam satu koridor SDI, saling terintegrasi dengan portal pemerintah pusat dan dapat di akses melalui pemanfaatan internet.

Gambar 2. Portal Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan
Sumber: Website SIMATA Sumsel

Pada gambar 2 menujukan tampilan beranda pada portal SIMATA Sumsel yang dibuat untuk mempermudah masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam mencari data-data statistik, geospasial, berita daerah dan informasi lainnya yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh OPD maupun instansi lainnya di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Portal SIMATA Sumsel ini dikelola oleh Tim Pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan yang diwewenangkan oleh Gubernur kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Sumatera Selatan dan juga Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 892/KPTS/DISKOMINFO/2021 tentang Tim Pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan.

Pada Kebijakan Satu Data maupun kebijakan-kebijakan digital lainnya pemanfaatan internet menjadi salah satu kebutuhan pokok pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan maupun saat melakukan kegiatan operasional pada produk kebijakan seperti portal, website dan produk kebijakan digital lainnya. Oleh karena itu pentingnya ketersediaan akses terhadap internet menjadi semakin dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat, hal ini sejalan dengan revolusi industri 4.0 sarana TIK yang digunakan

masyarakat telah mengalami pergeseran. Semua kepentingan termasuk kepentingan bernegara dituntut untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan melalui digitalisasi. Penggunaan digitalisasi melalui pemanfaatan internet dianggap akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta akan menciptakan suatu pemerintah yang transparan.

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap TIK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Persentase Rumah Tangga	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga						
Memiliki Telepon Rumah	3,44	2,83	2,62	2,19	1,32	0,93
Memiliki Komputer	14,48	15,10	16,62	15,66	14,57	14,97
Penduduk 5 +						
Memiliki Telepon Seluler	56,66	56,43	73,08	61,12	60,70	60,68
Menggunakan Komputer	12,37	13,43	15,46	15,06	11,10	10,89
Mengakses Internet	17,71	19,98	25,65	33,35	38,14	46,00

Sumber : Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2020

Pada tabel 2 menujukan penggunaan TIK di masyarakat mengalami pergeseran, penggunaan telepon rumah dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan yang disebabkan oleh masyarakat yang lebih memilih menggunakan telepon seluler, penggunaan telepon seluler pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan yang cukup pesat dan pada tahun 2018-2020 hanya mengalami sedikit penurunan, begitu juga dengan memiliki dan menggunakan komputer yang ternyata pada tahun 2015-2017 juga mengalami kenaikan dan pada tahun 2018-2020 mengalami sedikit penurunan, berbeda dengan penggunaan internet dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, peningkatan terus terjadi dimulai dari tahun 2015 sebesar 17,71 persen, tahun 2016 sebesar 19,98

persen, tahun 2017 sebesar 25,55 persen, tahun 2018 sebesar 33,35 persen, tahun 2019 sebesar 38,14 persen, dan tahun 2020 menjadi sebesar 46 persen. Peningkatan penggunaan internet terjadi karena internet dapat menjadi sangat bermanfaat dalam hal pekerjaan, pendidikan, bahkan sebagai sarana bersosialisasi masyarakat. Hal ini dapat kita pahami bahwa di era sekarang, penggunaan akses internet sudah sangat diperlukan, maka kebijakan satu data memang sudah harus di implementasikan secepatnya agar kita tidak tergerus oleh kemajuan teknologi dan dapat mengoptimalkan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu kebijakan satu data menghasilkan suatu produk digital berupa portal sistem informasi digital yang memuat data yang kemudian akan di integrasikan antara portal pemerintah pusat dengan portal pemerintah daerah.

Namun saat ini internet di Provinsi Sumatera Selatan masih belum terdistribusi ke seluruh pelosok daerah, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur penunjang akses internet belum terbangun ke seluruh wilayah, padahal internet sudah menjadi kebutuhan pokok manusia di era digital guna menunjang kehidupan yang lebih baik. Keterbatasan untuk mengakses internet menyebabkan terhambatnya penggunaan teknologi sebagai basis data.

Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa			
	4G/LTE	3G/H/H+/ EVDO	2,5H/E/GPRS	Tidak Ada Internet
Banyuasin	197	96	11	-
Empat Lawang	112	34	8	1
Lahat	264	84	19	10
Lubuk Linggau	63	2	7	-

Muara Enim	171	54	26	3
Musi Banyuasin	135	79	21	5
Musi Rawas	126	44	12	12
Musi Rawas Utara	45	24	16	3
Ogan Ilir	213	26	2	-
Ogan Komering Ilir	212	77	21	16
Ogan Komering Ulu	131	17	8	1
OKU Selatan	136	65	46	6
OKU Timur	249	56	24	3
Pagar Alam	26	9	-	-
Palembang	99	8	-	-
Penukal Abab Lematang Ilir	62	27	7	1
Prabumulih	34	3	-	-
Sumatera Selatan	**2275**	**705**	**228**	**61**

Sumber: Publikasi BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2021

Pada tabel 3 menunjukkan terdapat total 61 titik yang belum tersentuh oleh internet, daerah tertinggi yang belum tersentuh oleh internet berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan total 16 titik, adapun daerah dengan penyebaran sinyal terbaik berada di Kota Palembang, karena Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan roda ekonomi utama di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi penyebab masih adanya wilayah yang belum tersentuh internet adalah kendala letak geografis yang ekstrem, tingkat keamanan di lokasi, sulitnya transportasi untuk melintasi wilayah tersebut, dan minimnya pasokan listrik.

Selain pendistribusian internet yang belum menyeluruh, permasalahan kebijakan Satu Data juga di perparah oleh permasalahan lain yang harus dihadapi, seperti belum adanya satu aplikasi khusus yang bisa digunakan oleh semua instansi, masih belum seragamnya format dan metadata di setiap instansi, adanya ribuan aplikasi di instansi yang menyulitkan integrasi data, belum adanya mekanisme koordinasi antar instansi, kurangnya pemahaman tentang perlunya *open data,* mekanisme verifikasi dan validasi yang belum terkelolah dengan baik, kurangnya SDM yang berkompeten untuk mengkomputasi dan menganalisa data, masih banyaknya versi data dari sumber yang berbeda-beda membuat kualitas dan evaluasi kebijakan menjadi tidak akurat, tumpang tindih data masih sering terjadi karena tidak adanya proses pengumpulan data yang berstandar. Selain itu permasalahan yang paling mencolok yaitu masih adanya ego sektoral yang menyebabkan tidak maunya instansi untuk membagikan datanya serta menyebabkan keterlambatan distribusi data kedalam portal atau data lag.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan transparan serta menjadi solusi untuk permasalahan data yang selama ini kerap menjadi kendala bersama khususnya dalam ruang lingkup organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyediakan data-data statistik.

Oleh karena itu Penulis termotivasi untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DALAM MENYEDIAKAN BASIS DATA YANG AKURAT DAN TRANSPARAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan)” dan diharapkan penelitian ini dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan satu data di Provinsi Sumatera Selatan serta apa saja yang menjadi

faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan satu data Provinsi Sumatera Selatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pada penelitian ini terdapat batasan dan rumusan masalah agar pembahasan terfokus, tidak terlalu meluas dan menghindari terjadinya bias saat penelitian, yaitu :

1. Batasan Masalah

Untuk mempermudah memahami penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Transparan di Provinsi Sumatera Selatan (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan) terdapat batasan yang perlu diperhatikan yaitu penelitian ini membahas mengenai data-data statistik yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan dan apa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan satu data di Provinsi Sumatera Selatan serta untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pelaksanaan Kebijakan Satu Data dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Secara Praktis

Ditinjau dari aspek praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Kebijakan Satu Data serta memberikan masukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Kebijakan Satu Data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alamsyah, K. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*.Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Anggara,S. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung:CV PUSTAKA SETIA.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah University Press.

Indiahono, D. 2017. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis Yogyakarta: Gava Media.*

Kadji,Y.2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*.Gorontalo: UNG Press.

Miles, M. B., Hubberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. California: SAGE Publications.

Pamungkas, C.A. 2017. Pengantar dan Implementasi Basis Data. Yogyakarta: Deepublish.

Setyianingrum, S. 2013. Konsep dan Perancangan Basis Data. Yogyakarta: Skripta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, H. N. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset

Peraturan:

Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembar Negara RI Tahun 2008, No.61. Sekretariat Negara: Jakarta

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesa*. Lembar Negara RI Tahun 2019, No.112. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Sumatera Selatan.* Berita Daerah 2017, No 380. Sekretariat Daerah: Sumatera Selatan

Sumatera Selatan. 2021. Keputusan Gubernur Nomor 892/KPTS/DISKOMINFO/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2020. Peodman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. 2018. Rencana Strategis 2018-2023. Palembang. Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan

Internet:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.2020. *Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2020*. Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan *https://sumsel.bps.go.id/publication/2021/08/27/6becfed5e77a58a959a3265e/buku-saku-data-dan-indikator-sosial-provinsi-sumatera-selatan-2006-2020.html*. (Diakses: 5 Desember 2021 Pukul 14:21 WIB)

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.2021. *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka* . Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan *https://sumsel.bps.go.id/publication/2021/02/26/147e35ceefdd0719b3d563d4/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2021.html.* (Diakses: 6 Desember 2021 Pukul 13:25 WIB)

http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BAPPENAS.pdf (Diakses: 8 Desember 2021 Pukul 09:38 WIB)

Ivanovich Agusta. (2014). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *02*(1998). *https://www.academia.edu/7746825/Teknik_Pengumpulan_dan_Analisis_Data_Ku alitatif_1.* (Diakses: 8 Desember 2021 Pukul 20:05 WIB)

Website:

https://data.go.id/home

https://kominfo.sumselprov.go.id/index.php?m=kk&id=1

http://satudata.sumselprov.go.id/v3/index.php?q=Beranda